

Konsep Green Settlement dalam Penataan Permukiman Padat Penduduk

Debby Budi Susanti

Dosen Prodi Arsitektur, Fak. Teknik Sipil dan Perencanaan, ITN Malang
e-mail: budisusantidebby@lecturer.itn.ac.id

Gaguk Sukowiyono

Dosen Prodi Arsitektur, Fak. Teknik Sipil dan Perencanaan, ITN Malang
e-mail: gaguk_sukowiyono@lecturer.itn.ac.id

ABSTRAK

Permukiman masyarakat kampung kota yang sebagian besar memiliki kondisi padat penduduk sangat rawan untuk mendapat julukan sebagai permukiman kumuh karena minimnya fasilitas terkait utilitas yang dirancang sebelumnya oleh pemerintah setempat. Hal tersebut masih ditambah lagi dengan kondisi masyarakat kampung kota yang sebagian besar berada pada level menengah ke bawah atau yang lebih dikenal dengan sebutan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain misalnya pemerintah daerah dan para akademisi untuk memberikan konsep penataan permukiman yang lebih baik dengan menyesuaikan kemampuan yang dimiliki oleh penduduk yang bermukim di daerah tersebut. Konsep hunian yang mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi secara mandiri yang memiliki konsep green-settlement diharapkan mampu menjadi solusi terbaik untuk permasalahan masyarakat.

Kata kunci : permukiman, kampung kota, green settlement

ABSTRACT

Urban village settlements, most of which have densely populated conditions, as slums area settlements, because of the minimum of utility-related facilities designed previously by the local government. This is still coupled with the condition of urban village communities, most of which are at the lower middle level or better known as low-income communities (MBR), so they really need help from other parties such as local governments and academics to provide a better settlement arrangement concept by adjusting the capabilities of residents living in the area. The concept of housing that is able to overcome the problems faced independently that has a green-settlement concept is expected to be the best solution to community problems. Abstract should end with a comment about the importance of the results or conclusions brief.

Keywords : settlement, urban village, green

1. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menjadi tolok ukur perkembangan sebuah kota atau pedesaan dapat dilihat dari kondisi permukiman penduduknya (Suryani, 2012; Fahran, 2022). Urbanisasi penduduk dari desa ke kota semakin menambah permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah dalam kebutuhan akan rumah tinggal (Yusuf, 2020). Kondisi demikian merupakan pemicu dari munculnya permukiman *slum area* dan hunian ilegal di beberapa pusat kota besar. Demikian juga yang terjadi pada lokasi penelitian di RW 02, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Berdasarkan kondisi tersebut, kota-kota besar di Indonesia berusaha menerapkan kebijakan Kota Tanpa Kumuh (Nurhasanah, 2019). Dalam tujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, permukiman padat penduduk di perkotaan memerlukan perbaikan sarana prasarana di lingkungannya (Sasongko et.al, 2021). Kondisi kualitas fisik pada kampung yang menjadi lokasi dirasa perlu mendapat perhatian khusus terkait Upaya penanganan.

Selayaknya kampung kota yang terdiri berbagai level sosial ekonomi masyarakatnya, lokasi penelitian ini juga merupakan permukiman kampung kota padat penduduknya yang memiliki berbagai level sosial ekonomi masyarakat. Dampak dari padatnya sebuah permukiman penduduk adalah terjadinya ketidakseimbangan ekologi (Suryani, 2012). Keterbatasan lahan dan pemanfaatan lahan untuk multi-fungsi merupakan permasalahan yang menjadi kendala utama bagi permukiman tersebut, selain permasalahan yang menyangkut utilitas seperti sampah (Artati dkk, 2015). Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya sebuah konsep yang mampu meminimalkan dampak permukiman padat penduduk terhadap kelestarian ekologi di sekitarnya dan kenyamanan bermukim.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dasar permukiman berkelanjutan menurut Doxiadis dalam Hamidah, dkk (2016) terdiri dari : alam, lingkungan, jejaring, manusia, serta Masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa salah satu tujuan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah untuk mempersiapkan penataan dan pengembangan wilayah baik perkotaan maupun pedesaan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beberapa dampak negative akan muncul seiring dengan tekanan pertambahan penduduk di suatu wilayah, misalnya : banjir, polusi udara, tumpukan sampah, dll. (Suryani, 2012).

Salah satu hal yang tercantum dalam Undang-Undang yang terkait dengan perumahan dan permukiman tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus berdasar pada kelestarian dan keberlanjutan. Selain itu salah satu dasar dari prinsip pembangunan berkelanjutan adalah ekologi atau lingkungan (Hamidah dkk, 2016). Sedangkan keseluruhan dari prinsip pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. ekonomi atau kesejahteraan (*economy*),
2. ekologi atau lingkungan (*ecology*),
3. pemerataan (*equity*),
4. peran serta (*engagement*),
5. energi (*energy*).

Konsep permukiman berkelanjutan (*eco-settlement*) ini pada awalnya diawali dari konsep bangunan berkelanjutan (*eco-building*) (Fahrhan dkk, 2022). Konsep *eco-settlement* adalah sebuah konsep yang mengutamakan harmonisasi antara ekonomi, sosial dan ekologi, yang bertujuan untuk ekosistem yang berkelanjutan.

Menurut Guy Farnier Simon dalam Junara (2019), arsitektur berkelanjutan memiliki enam aspek penting, yaitu :

1. *Eco-technic*, yaitu terintegrasi dengan lingkungan global di sekitarnya, baik lingkungan alami maupun buatan.
2. *Eco-centric*, yaitu harmonisasi dengan unsur alam di sekitarnya dan menghindari kerusakan atau pencemaran alam.
3. *Eco-aesthetic*, yaitu rekonstruksi menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
4. *Eco-cultural*, yaitu menggabungkan antara lingkungan fisik dan non-fisik (budaya) local dan regional kawasan.
5. *Eco-medical*, yaitu lingkungan harus mampu mendukung kesehatan Masyarakat.
6. *Eco-social*, yaitu partisipasi masyarakat dalam sinergitas tiap individu dengan kelompok masyarakat di sekitarnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam menyajikan konsep-konsep terkait *green settlement*, dengan diawali dari pengumpulan data primer dan sekunder terkait kondisi lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kawasan RW. 02, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Setelah melakukan pencarian data primer dengan mendatangi langsung lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan perwakilan

warga Masyarakat di daerah tersebut, maka permasalahan utama adalah minimnya lahan perumahan yang dimiliki penduduk dan tingkat ekonomi yang berada pada golongan menengah ke bawah. Hal tersebut berdampak pada lingkungan sekitar permukiman yang terkesan kumuh dan tidak teratur karena minimnya fasilitas utilitas kampung. Sehingga diperlukan suatu konsep yang dapat menjadi panduan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara mandiri dengan partisipasi masyarakat.



Gambar. 1
Lokasi Penelitian
Sumber: data pribadi

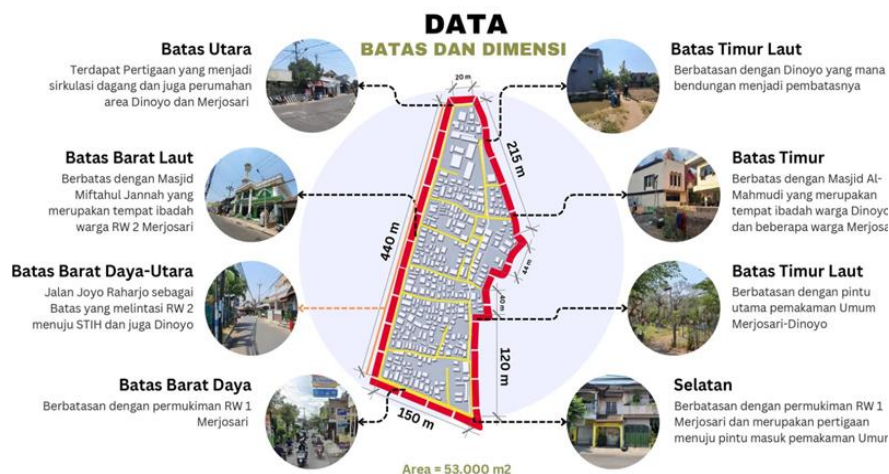


Gambar. 2
Tata Guna Lahan di Lokasi Penelitian
Sumber: analisa pribadi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di perkampungan padat penduduk yang memiliki akses koridor jalan yang sebagian besar sempit. Terbatasnya lahan hunian di kampung tersebut menyebabkan rumah-rumah di kawasan tersebut sebagian besar tidak memiliki pekarangan rumahnya, sehingga beberapa warga menjadikan area jalan umum di depan rumahnya untuk meletakkan barang-barang pribadi miliknya.



Gambar. 3
Batas Lokasi Penelitian

Sumber: analisa nihadi

Lokasi rumah yang sangat berdekatan juga menyebabkan sebagian rumah di wilayah tersebut kurang mendapat penghawaan dan pencahayaan alami. Hal tersebut menyebabkan kawasan di sepanjang koridor jalan terkesan agak gelap dan lembab.



Gambar. 4
Kondisi Rumah dan Koridor Jalan di Lokasi Penelitian

Sumber: data pribadi

Minimnya sarana utilitas yang dimiliki oleh rumah dan kampung tersebut menyebabkan sungai kecil yang berada di sepanjang jalan menjadi tempat untuk membuang limbah dari kamar mandi dan dapur rumah warga. Selain itu, karena luasan lahan rumah yang terbatas maka Sebagian dari area jalan juga menjadi tempat untuk usaha milik warga.



Gambar. 5
Pemakaian Koridor Jalan di Lokasi Penelitian

Sumber: data pribadi

Selain lahan perumahan warga, di kawasan lokasi penelitian juga terdapat dua area pemakaman, yaitu area makam yang dikeramatkan dan makam umum. Keberadaan area makam keramat yang diyakini sebagai leluhur kampung merjosari, menjadikan kawasan tersebut menjadi pusat kegiatan budaya warga pada saat bersih desa dan juga seringkali menjadi area yang dikunjungi masyarakat dari daerah lain dengan tujuan spiritual.



Gambar. 6
Makam Keramat dan Makam Umum di Lokasi Penelitian
Sumber: data pribadi

Minimnya sarana utilitas yang ada di lokasi juga menjadi permasalahan yang sangat mengganggu kenyamanan warga yang menghuni di permukiman tersebut. Beberapa lokasi lahan kosong yang ada di kawasan tersebut menjadi tempat pembuangan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut menambah kesan kumuh pada permukiman di lokasi penelitian.



Gambar. 7
Kondisi Buangan Sampah di Lokasi Penelitian
Sumber: data pribadi

4.2 Kondisi Lokasi Penelitian

Berdasarkan dari kondisi dan permasalahan yang diperoleh dari data primer tersebut, maka beberapa konsep *green-settlement* yang dapat diterapkan pada permukiman kampung kota tersebut adalah :

a. Pengelolaan utilitas secara mandiri

Kondisi tingkat ekonomi penduduknya yang sebagian besar berada pada tingkat menengah ke bawah menyebabkan minimnya kemampuan mereka untuk mengeluarkan biaya tambahan yang menyangkut penanganan limbah rumah tangga. Selain itu, penduduk tersebut juga menganggap bahwa penanganan limbah rumah tangga dengan cara yang sesuai peraturan kesehatan lingkungan bukanlah sesuatu hal yang harus dianggap penting. Luasan lahan rumah yang tidak terlalu luas juga menjadi salah satu penyebab tidak adanya area yang dapat dipergunakan untuk mengelola limbah rumah tangga dengan benar di setiap rumah. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka beberapa hal yang dapat menjadi solusi tersebut adalah dengan cara :

- Menyediakan area khusus pada lahan milik pemerintah desa/kelurahan yang dapat menjadi area pengelolaan limbah sampah padat rumah tangga, dengan mengelola menjadi bank sampah bagi limbah plastik atau kertas, dan menjadi area pengolahan komposter.
- Menyediakan IPAL bersama di beberapa titik lokasi sebagai wadah pengolahan limbah dari kamar mandi agar tidak mencemari sungai yang ada di kawasan tersebut.
- Membuat filter dan ramp penutup atas di daerah aliran sungai agar sampah tidak mengotori dan mencemari sungai.
- Menyediakan fasilitas penerangan jalan yang cukup pada area koridor jalan yang gelap dengan menggunakan panel surya di beberapa titik lampu agar tidak menambah beban biaya tambahan bagi masyarakat.

b. Peningkatan fasilitas penunjang bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat

Kondisi masyarakat yang sebagian besar bekerja dari sektor non-formal serta keberadaan makam keramat yang menyebabkan kampung tersebut menjadi pusat pelaksanaan kegiatan budaya setempat, maka ruang komunal sangat diperlukan dengan mengolah lahan kosong yang dimiliki pemerintah daerah sebagai area untuk unit UMKM dan space untuk bersosialisasi antar warga masyarakat

5. KESIMPULAN

Perbaikan kondisi sebuah permukiman dengan kondisi masyarakat menengah ke bawah perlu melibatkan dan mengedukasi warga agar mampu secara mandiri mengelola lingkungan alam dan buatan yang ada di sekitarnya, agar kelestarian ekologi dapat terjaga meskipun berada pada lahan sempit yang tidak memungkinkan untuk perluasan wilayah lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryani, A. (2012). Tantangan Implementasi Konsep Eco-Settlement Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam UU No 1/2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. *Jurnal Aspirasi*, 2(1), 1–16. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/431>
- Yusuf, A., & Prayogi, L. (2020). Tinjauan Konsep Keberlanjutan Pada Kawasan Pemukiman Summarecon Bekasi Dalam Aspek Sosial. *Arsitektur PURWARUPA*, 04(2), 23–30.
- Artati, H. K., & Musyafa, D. A. (2015). Penerapan Konsep Eco-Settlement Pada Sarana Prasarana Infrastruktur Pendukung Permukiman Huntap (Studi Kasus: Huntap Pagerjuran Dan Huntap Karangkendal Kecamatan Cangkringan). *Jurnal Teknisia*, XX(2), 119–126.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2011. (2011). *Ep Ha M Ep Ha*.
- Hamidah, N., Rijanta, R., Setiawan, B., & Marfai, M. A. (2016). Kampung Sebagai Model Permukiman Berkelanjutan. *Inersia*, XII(2), 114–124.
- Fahran, M., Arifin, M., & Rasyid, A. R. (2022). Arahana Penataan Kawasan Permukiman di Kawasan Wisata Benteng Somba Opu dengan Pendekatan Eco-Settlements. ... *Wilayah & Kota Maritim (Journal of ...*, 10(2), 136–145. <https://cot.unhas.ac.id/journals/index.php/jwkm/article/view/1606>
- Ghozali, A., Ratna, R., & Retno, D. (2013). Sustainable Green Settlement: The Arrangement Strategy Of Tambak Wedi Kampong Toward Sustainable Kampong. *International Journal of Education and Research*, 1(12), 1–10. www.ijern.com
- Junara, N., & Triyadi, S. (2019). Green Open Spaces and Sustainable Settlements from the Islamic Perspectives-Case Study Kampung Kauman Malang. *International Journal of Engineering & Technology*, 8(1), 523–527. www.sciencepubco.com/index.php/IJET